

PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024

PERDA NO.6, LD 2025/NO.6 TLD NO. 153, 16 HLM.

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Dasar Hukum:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 yaitu:
 1. Pasal 1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 2. Pasal 2 Laporan realisasi APBD.
 3. Pasal 3 Uraian laporan realisasi.
 4. Pasal 4 Laporan perubahan saldo.
 5. Pasal 5 Laporan operasional.
 6. Pasal 6 Laporan perubahan ekuitas.
 7. Pasal 7 Neraca.
 8. Pasal 8 Laporan arus kas.
 9. Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan.
 10. Pasal 10 Pertanggungjawaban APBD tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX.
 11. Pasal 11 *Audit cash opname* dan audit laporan keuangan pemerintah daerah.
 12. Pasal 12 Penjabaran Pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2025.